

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertambahan jumlah penduduk yang terus terjadi namun tidak diikuti dengan kesadaran untuk menjaga kualitas ruang yang ada menjadi dasar utama semakin kompleksnya masalah pemanfaatan ruang saat ini. Permasalahan seperti permukiman kumuh, pembangunan tidak sesuai aturan tata ruang, tumpang tindih penggunaan lahan, ataupun lainnya sudah seharusnya menjadi perhatian bersama. Banyak pihak menyadari bahwa penyelesaiannya masalah seperti ini sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan peran pemerintah melalui pendekatan *top down* karena apa direncanakan kadang kurang menyentuh akar permasalahan akibat kurangnya pemahaman akan kondisi lapangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah sendiri.

Saat ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu pendekatan yang lebih bersifat dialogis dan kolaboratif dimana melibatkan banyak pihak khususnya masyarakat yang lebih paham kondisi di lapangan. Kolaborasi berbagai pihak sudah menjadi kebutuhan khususnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum yang tidak bisa diselesaikan secara individual (Brand dan Gaffikin, 2007). Dari kondisi ini maka muncul perencanaan kolaboratif dimana dalam prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah forum dialog untuk mengurai permasalahan yang ada dalam berbagai perspektif guna mencari solusi yang diterima dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat (Goldstein dan Butler, 2010; Bentrup, 2001).

Perencanaan kolaboratif dalam konteks penataan ruang dipahami sebagai sebuah cara membangun kapasitas hubungan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan bersama terkait dengan keberlanjutan fungsi ruang, manajemen pemanfaatan ruang, atau kualitas dari ruang tersebut dengan mengkaitkan isu-isu ekonomi, lingkungan, dan sosial (Healey, 2006). Pada dasarnya terdapat dua pemangku kepentingan yang sangat berperan mencapai sebuah ruang yang berkelanjutan yaitu pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi

antara pemerintah dengan masyarakat menjadi penting dilakukan saat ini karena semakin kompleks permasalahan yang terjadi namun masing-masing pihak memiliki keterbatasan untuk menyelesaikannya. Kondisi tersebut akan terminimalisir apabila masyarakat dan pemerintah ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam konteks penataan ruang, kolaborasi pemerintah dengan masyarakat telah ditetapkan dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 65 ayat (1) “penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat” dan ayat (2) “peran masyarakat dalam penataan ruang antara lain partisipasi dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang”.

Sejak tahun 2008 terdapat program yang mampu menjadi media kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda yaitu Program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas). PLPBK merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum yang menjadi bagian dari siklus PNPM Mandiri Perkotaan. PLPBK ini pada dasarnya sebagai program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan penataan ruang. Program ini mencoba untuk mendesain bagaimana masyarakat dan Pemda berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan di skala lingkungan permukiman mengikuti kaidah-kaidah tata ruang. Dalam pelaksanaannya disalurkan dana 1 milyar rupiah sebagai dana stimulan pelaksanaan program yang dapat digunakan 30% untuk proses perencanaan dan 70% untuk pembangunan fisik. Salah satu bentuk keluaran utama dari program ini berupa dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Dalam rencana ini tersusun indikasi program 3-5 tahun ke depan sebagai rencana investasi jangka menengah kelurahan dimana rencana pembangunan tidak hanya ditujukan untuk kawasan prioritas tetapi juga pada kawasan-kawasan lainnya di kelurahan tersebut secara keseluruhan.

Wahyudi (2013) telah melakukan penelitian awal terkait kolaborasi Pemda dengan masyarakat yang berfokus pada tahapan proses perencanaan dalam program PLPBK Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan dan Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal. Dari hasil penelitian tersebut teridentifikasi bahwa pelaksanaan PLPBK tidak hanya melibatkan peran serta masyarakat tetapi juga keaktifan Pemda sebagai Tim Teknis yang berfungsi membimbing

masyarakat. Hal ini tercermin dari keanggotaan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang terdiri atas berbagai lapisan mulai dari BKM, fasilitator, Kelurahan, SKPD, dan relawan-relawan. Pada prosesnya komunikasi antara Pemda dan masyarakat tercermin ketika rembug warga, lokakarya, dan konsultasi publik dilakukan yang mempertemukan kedua pelaku utama ini secara bersama mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan arah pembangunan. Rencana penataan kawasan yang disusun juga tidak terlepas dari rencana dan kebijakan yang ada di tingkat kota/kabupaten yang berkaitan dengan kawasan prioritas di masing-masing kelurahan. Kolaborasi juga tercermin ketika pembangunan fisik kawasan dilakukan saat sumber dana pembangunan tidak hanya berasal dari dana stimulan tetapi juga ada yang berasal dari dana APBD. Pemda Kota Pekalongan memberikan bantuan pembangunan MCK, Pamsimas, pavingisasi jalan, dan lainnya yang disalurkan kepada Kelurahan Podosugih dengan total pembiayaan mencapai Rp 810.000.000. Begitu juga yang terjadi di Kelurahan Kebondalem dimana disalurkan bantuan pembangunan berupa bibit tanaman, alat biopori, pavingisasi jalan, dan lainnya dengan total pembiayaan sebesar Rp 355.150.000.

Walaupun sudah terdapat pembangunan fisik yang dilakukan, rencana yang telah tertuang dalam indikasi program belumlah semua terealisasi. Masih terdapat rencana-rencana lain disetiap tahunnya dalam jangka waktu perencanaan 5 tahun yang perlu untuk dilaksanakan. Penekanan yang perlu menjadi fokus perhatian untuk keberlanjutan program PLPBK ini adalah bagaimana rencana-rencana tersebut terus mendapat perhatian untuk dijalankan setiap tahunnya. Dalam menjalankannya maka tidak terlepas dari kebutuhan dana pembangunan. Oleh sebab itu perlu adanya pencarian peluang pendanaan yang bisa berasal dari masyarakat secara swadaya dan juga Pemda dengan dana APBD.

Jika berbicara mengenai pemanfaatan dana APBD, maka kita tidak bisa terlepas dari kegiatan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Musrenbang pada dasarnya merupakan wadah formal dialog antara Pemda dan masyarakat dalam konteks yang sama yaitu penyusunan rencana pembangunan namun diskala yang lebih besar yaitu skala kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 dijelaskan bahwa musrenbang merupakan wahana publik yang diadakan tiap tahun dalam penyusunan RKPD

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD. Musrenbang pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Musrenbang berperan untuk membawa para pemangku kepentingan untuk memahami isu-isu dan permasalahan perencanaan pembangunan daerah, kesepakatan prioritas pembangunan, dan konsensus untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah tersebut. Jika terimplementasi dengan baik, musrenbang ini bisa menjadi salah satu wadah kolaborasi antara Pemda dengan masyarakat yang mensikronisasikan pendekatan *top down* dengan *bottom up*.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan Wahyudi (2013) pelaksanaan PLPBK di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal telah dilakukan dengan baik pada tahapan proses perencanaan. Proses perencanaan ini dilalui dengan mekanisme yang cukup panjang dalam kurun waktu  $\pm$  6 bulan sehingga mampu menghasilkan produk rencana dengan indikasi program yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Setelah melewati proses perencanaan cukup baik yang secara langsung membangun kolaborasi masyarakat dan Pemda di dalamnya maka bagian terpenting saat ini adalah pelaksanaan dari rencana itu sendiri. Akan sangat disayangkan proses yang cukup panjang hanya terhenti pada produk rencana saja tanpa ada realisasi setiap tahunnya.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa untuk merealisasi indikasi program setiap tahun sangat dibutuhkan sumber pendanaan. Sayangnya, rencana yang telah disusun bersama ini memiliki pendanaan yang cukup besar. Sebagai contoh di Kelurahan Podosugih membutuhkan pendanaan sebanyak Rp 4.443.429.125,- padahal dana pembangunan yang berasal dari program hanya sebesar Rp 700.000.000,-. Masyarakat sendiri tidak bisa menjalankan semua rencana tersebut secara swadaya sehingga perlu adanya pemanfaatan sumber pendanaan lainnya seperti dana APBD dimana melalui mekanisme musrenbang.

Implementasi pelaksanaan musrenbang bisa menjadi salah satu bahan kajian sejauh mana Pemda melibatkan peran masyarakat dalam perumusan

kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap tahunnya. Sayangnya, pelaksanaan musrenbang sendiri sampai saat ini cukup banyak mendapat kritikan. Seringkali keterlibatan masyarakat hanya dianggap sebagai formalitas dimana usulan yang diajukan masyarakat kadang hilang dalam alur musrenbang. Kondisi ini didukung oleh Ma'rif et al (2010) bahwa sinkronisasi antara alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya terjamin dalam musrenbang dan pelaksanaan musrenbang belum menjangkau isu-isu strategis tataran lokal.

Penelitian ini berfokus pada dua kajian yaitu implementasi rencana PLPBK dan pelaksanaan musrenbang untuk melihat peluang keterkaitan antara PLPBK dengan musrenbang. Asumsinya antara PLPBK dengan musrenbang ini bisa terjadi keterkaitan dimana rencana-rencana dalam PLPBK yang belum dijalankan bisa diusulkan ke dalam proses musrenbang sebagai usulan masyarakat dalam perumusan rencana kerja SKPD. Apabila dengan menggunakan forum perencanaan pembangunan formal ini rencana dalam PLPBK dapat terdani maka secara tidak langsung terbentuk juga kolaborasi Pemda dengan masyarakat dalam tahap pelaksanaan rencana PLPBK. Kolaborasi Pemda dan masyarakat dalam tahap pelaksanaan akan terwujud manakala terjadi *sharing* sumberdaya serta rencana pembangunan yang disusun masyarakat dapat diintegrasikan dengan rencana pembangunan yang dimiliki Pemda secara berkelanjutan. Dengan demikian maka penelitian ini ingin melihat apakah kolaborasi Pemda dengan masyarakat yang telah terbangun dalam proses perencanaan dapat terwujud juga pada tahap pelaksanaan secara berkelanjutan. Dari rumusan permasalahan ini maka pertanyaan penelitian utama yang muncul adalah **“sejauh mana program PLPBK dapat diintegrasikan dengan kegiatan musrenbang sebagai upaya realisasi rencana pembangunan yang telah disusun secara kolaboratif antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah?”**

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran permasalahan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana program PLPBK dapat diintegrasikan dengan kegiatan musrenbang sebagai upaya untuk merealisasikan

rencana pembangunan yang telah disusun secara kolaboratif masyarakat dengan Pemda dalam program PLPBK sehingga tersalur dana APBD untuk pembangunan.

### **1.3.2 Sasaran Penelitian**

Sasaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

- a. Mengkaji bentuk kolaborasi yang telah terbangun antara Pemda dengan masyarakat dalam tahap implementasi rencana dalam program PLPBK.
- b. Mengkaji proses pelaksanaan musrenbang sebagai forum perencanaan pembangunan daerah.
- c. Mengkaji kedudukan PLPBK dalam kegiatan musrenbang sebagai wadah menyerap anggaran untuk merealisasi rencana pembangunan di PLPBK.
- d. Mengkaji peluang dan kendala dalam mengintegrasikan program PLPBK dengan kegiatan musrenbang sebagai media kolaborasi Pemda dengan masyarakat.

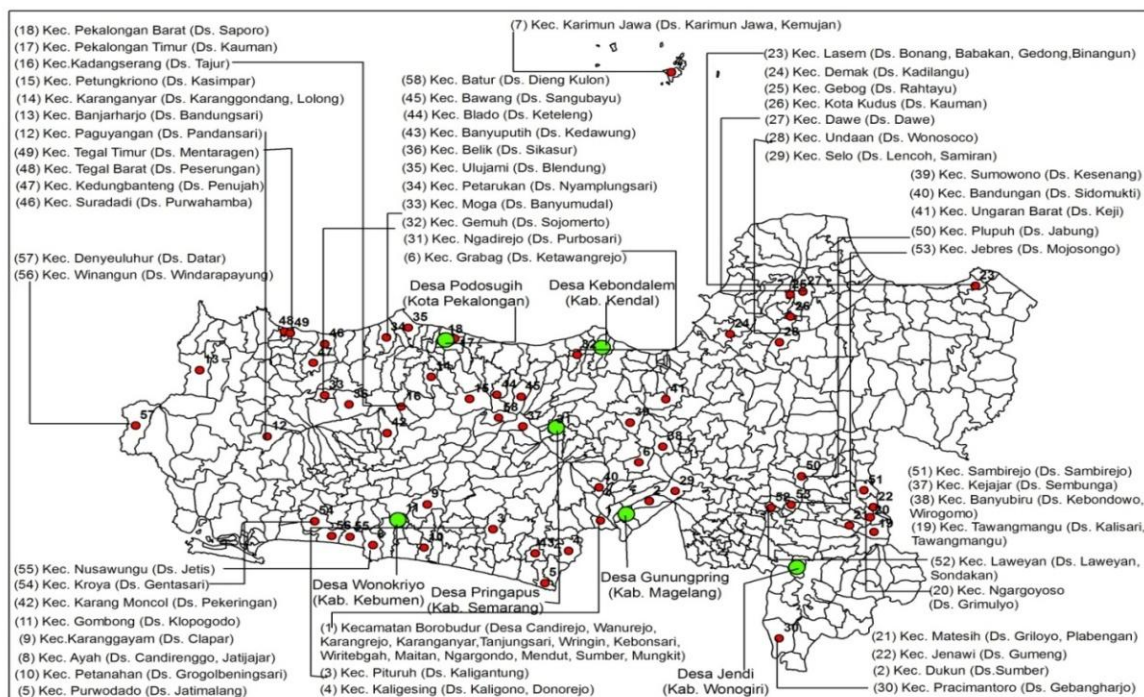
## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian di atas, maka penelitian akan dilakukan Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan terpilih menjadi studi kasus penelitian ini karena keduanya ditetapkan sebagai duta PLPBK dengan peran Pemda Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal yang dinilai baik bersama dengan masyarakat dalam menjalankan PLPBK (Satker PBL Provinsi Jawa Tengah, 2013). PLPBK menjadi pijakan awal karena secara tidak langsung dengan adanya program ini masyarakat sudah memiliki dokumen perencanaan berisi data dan informasi yang akurat mengenai permasalahan serta rencana kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika dibawa dalam musrenbang. Namun demikian tidak semua lokasi PLPBK dipilih, berikut adalah justifikasi pemilihan lokasi PLPBK yaitu:

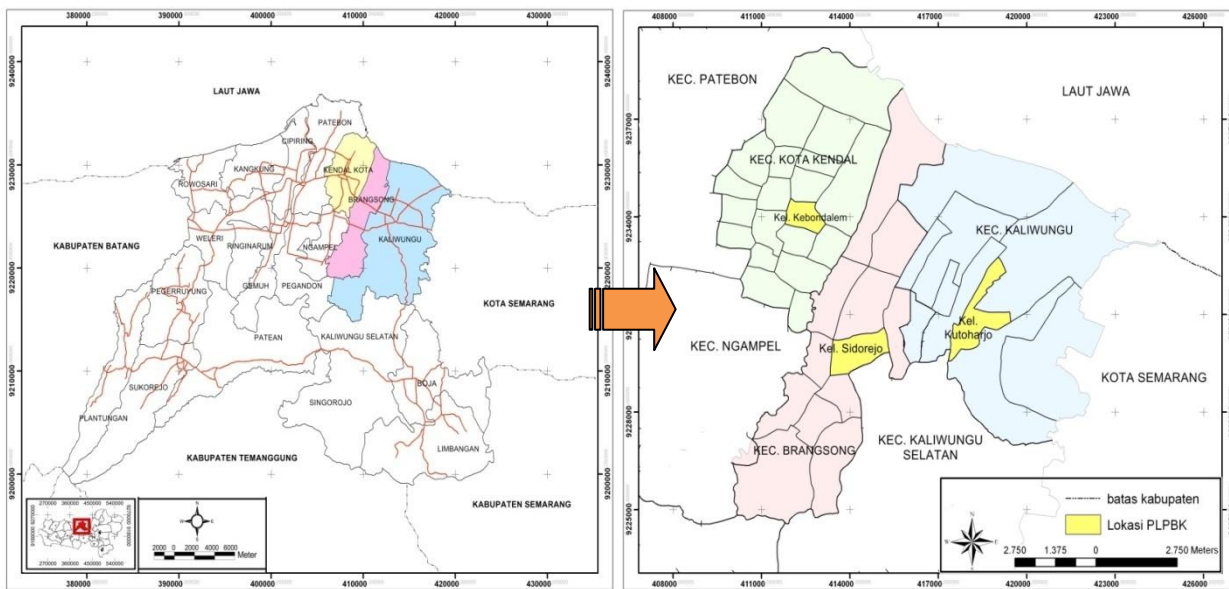
- Lokasi PLPBK yang dipilih adalah lokasi PLPBK yang memanfaatkan dana BLM berasal dari dana APBN (lokasi dipilih oleh Pemerintah Pusat) bukan merupakan lokasi PLPBK replikasi daerah.
- Lokasi PLPBK yang dipilih adalah lokasi PLPBK yang telah memanfaatkan dana BLM sampai pada tahap ke III (tahap akhir). Hal ini mencerminkan telah terjadi implementasi pembangunan fisik kawasan dan hasil pembangunan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian dipilih lokasi PLPBK yang telah cukup lama menjalankan program ini yaitu lokasi PLPBK di tahun 2008 dan 2009.

Dari kedua justifikasi di atas, maka lokasi penelitian difokuskan kepada 3 lokasi PLPBK di Kabupaten Kendal yaitu Kelurahan Kebondalem, Kelurahan Sidorejo, dan Kelurahan Kutoharjo, serta 3 lokasi di Kota Pekalongan yaitu Kelurahan Podosugih, Kelurahan Kramatsari, dan Kelurahan Kraton Kidul. Untuk melihat besarnya persentase penyerapan dana BLM dapat dilihat pada Bab III.



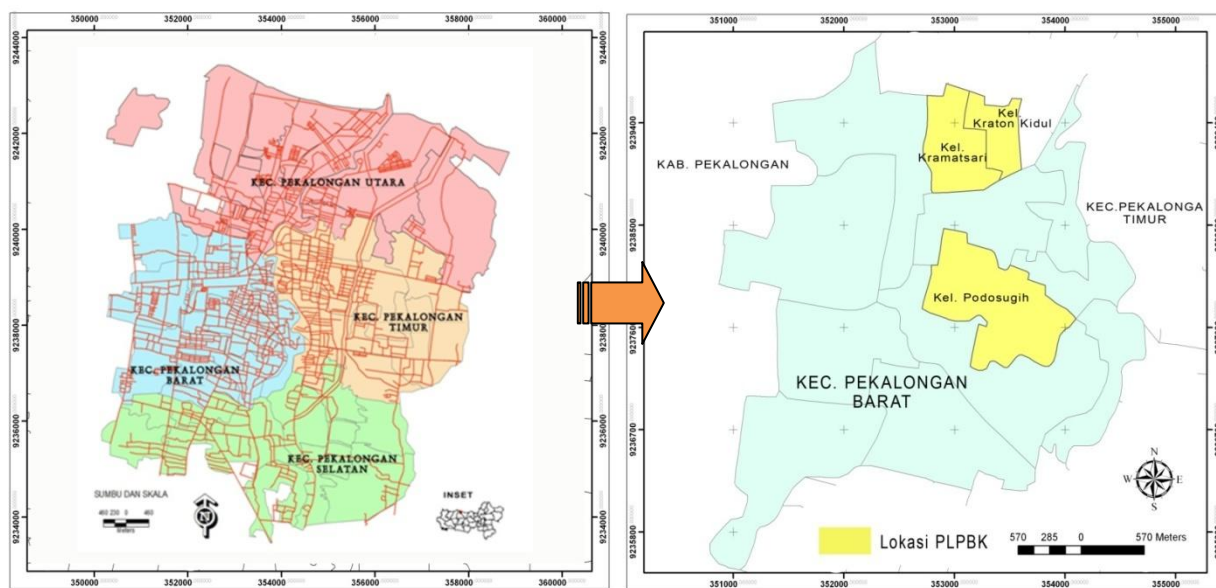
Sumber: Satker PBL Provinsi Jawa Tengah, 2012

**GAMBAR 1.1**  
**PERSEBARAN LOKASI PENERIMA PROGRAM PLPBK DI JAWA TENGAH**



Sumber: Bappeda Kabupaten Kendal, 2013

**GAMBAR 1.2**  
**LOKASI PLPBK DI KABUPATEN KENDAL**



Sumber: Satker PBL Provinsi Jawa Tengah, 2012

**GAMBAR 1.3**  
**LOKASI PLPBK DI KOTA PEKALONGAN**



### 1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi ini menjadi pembatas materi pokok pembahasan agar menghindari kesalahpahaman dari materi studi yang disampaikan dan membingkai arah penelitian. Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini yaitu:

a. Perencanaan Kolaboratif

Perencanaan kolaboratif menjadi tema besar penelitian ini dilakukan. Perencanaan kolaboratif diartikan sebagai sebuah bentuk perencanaan yang dalam prosesnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan dalam wadah sebuah forum dialog atau musyawarah (Innes dan Booher, 2002). Salah satu kelurahan dari perencanaan kolaboratif ini adalah tindakan bersama. Tindakan bersama yang tertuang dalam rencana strategis merupakan usaha-usaha yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak ini maka akan ada peningkatan kualitas dari solusi atau rencana yang dihasilkan (Bentrup, 2001; Tyrvaiven, 2013). Kolaborasi saat ini berfokus pada tindakan bersama yang dilakukan dalam implementasi rencana yang telah disusun bersama.

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang merupakan mekanisme perencanaan pembangunan formal daerah. Musrenbang adalah forum yang membawa para pemangku kepentingan untuk memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah, kesepakatan prioritas pembangunan, dan konsensus untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

c. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas merupakan sebuah konsep *neighbourhood planning* yang diimplementasikan di tingkat kelurahan/desa. PLPBK menjadi program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan melibatkan peran serta berbagai pihak khususnya masyarakat dan Pemerintah Daerah.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dengan kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda baik dalam konteks musrenbang maupun dalam PLPBK belum banyak dilakukan.

Berikut ini perbandingan beberapa penelitian relevan yang sebelumnya telah dilakukan dengan topik besar perencanaan kolaboratif.

**TABEL I.1**  
**KEASLIAN PENELITIAN**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Atika Silmi Rahmayanti	Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLPBK di Desa Kutoharjo, Kab.Kendal	Desa Kutoharjo, Kab. Kendal, 2012	Menggali pemaknaan dan implementasi perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLPBK.	Perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan PLPBK di Desa Kutoharjo masih belum maksimal diakibatkan kurangnya pencapaian unsur perencanaan kolaboratif seperti transfer pengetahuan, inklusifitas perencanaan, pembelajaran bersama, komitmen dan kepercayaan antar <i>stakeholders</i> .
2	Carmen Sirianni	<i>Neighborhood Planning as Collaborative Democratic Design (The Case of Seattle)</i>	Seattle, 2007	menganalisis sebuah contoh bagaimana Pemerintah Lokal bisa berfungsi membangun kapasitas dan memberdayakan masyarakat untuk menjalankan proses perencanaan kolaboratif dengan pemerintah kota di lingkup permukiman	Lima kunci perencanaan kolaboratif yang ada di Kota Seattle yaitu adanya keberadaan lembaga NPO ( <i>Neighborhood Planning Office</i> ), perumusan visi bersama, review hasil perencanaan oleh pemerintah kota, alat-alat yang digunakan dalam proses perencanaan, dan perananan penting keberadaan <i>project manager</i> .
3	Imam Wahyudi	Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Program PLPBK	Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan dan Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal, 2013	Menggambarkan ( <i>to describe</i> ) sejauh mana kolaborasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam proses perencanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas	Kolaborasi Pemda dengan masyarakat tergambar dalam empat kegiatan utama yaitu kemitraan ( <i>channeling</i> ) antara Pemda dengan masyarakat, proses perencanaan partisipatif untuk menyusun visi bersama, dialog komunikasi dalam lokakarya dan rembuk warga, dan integrasi perencanaan yang disusun oleh masyarakat dengan perencanaan di tingkat kota/kabupaten.
4	Samsul Ma'rif, Prihadi Nugroho, dan Lydia Wijayanti	Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang	Kota Semarang, 2010	mengevaluasi kinerja pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang	efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kota Semarang yang dianalisis berdasarkan empat faktor yaitu capaian program, kepuasan stakeholder, prinsip Musrenbang dan kualitas usulan Musrenbang masih belum efektif dilakukan akibat capaian dan kepuasan top down sudah cukup bagus akan tetapi tidak diimbangi dengan kualitas, capaian, dan kepuasan bottom up.

Sumber: Analisis Penyusun, 2014

Penelitian saat ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya mengenai kolaborasi Pemda dengan masyarakat dalam kegiatan PLPBK di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem. Penelitian yang dilakukan saat ini lebih melihat kolaborasi Pemda tidak hanya pada tataran proses perencanaan tetapi lebih melihat kolaborasi yang bisa dilakukan dalam tataran pelaksanaan rencana. Oleh sebab itu penelitian ini mengkaitkan dengan mekanisme perencanaan pembangunan formal atau musrenbang. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang berjudul “**Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Studi Kasus: Program PLPBK Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal)**” dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang mengkaji bagaimana kolaborasi antara Pemda dengan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman diharapkan nantinya akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan contoh kasus implementasi proses perencanaan kolaboratif khususnya yang terjadi di Indonesia. Perencanaan kolaboratif masih menjadi perencanaan yang belum lazim diimplementasikan dalam sistem perencanaan dan pembangunan di Indonesia hingga saat ini. Pendekatan perencanaan masih berpedoman pada dua bentuk utama yaitu perencanaan dari atas (*top down planning*) dan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*). Hal ini menjadi wajar terjadi ketika orientasi perencanaan masih melihat dalam sudut pandang darimana sumber inisiatif berasal dan siapa yang akan menjalankannya. Perencanaan kolaboratif ini menjadi berbeda dari dua bentuk perencanaan tersebut karena fokus kajian lebih melihat keterlibatan berbagai pihak dalam proses dan implementasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan pemanfaatan dan peningkatan kualitas ruang.

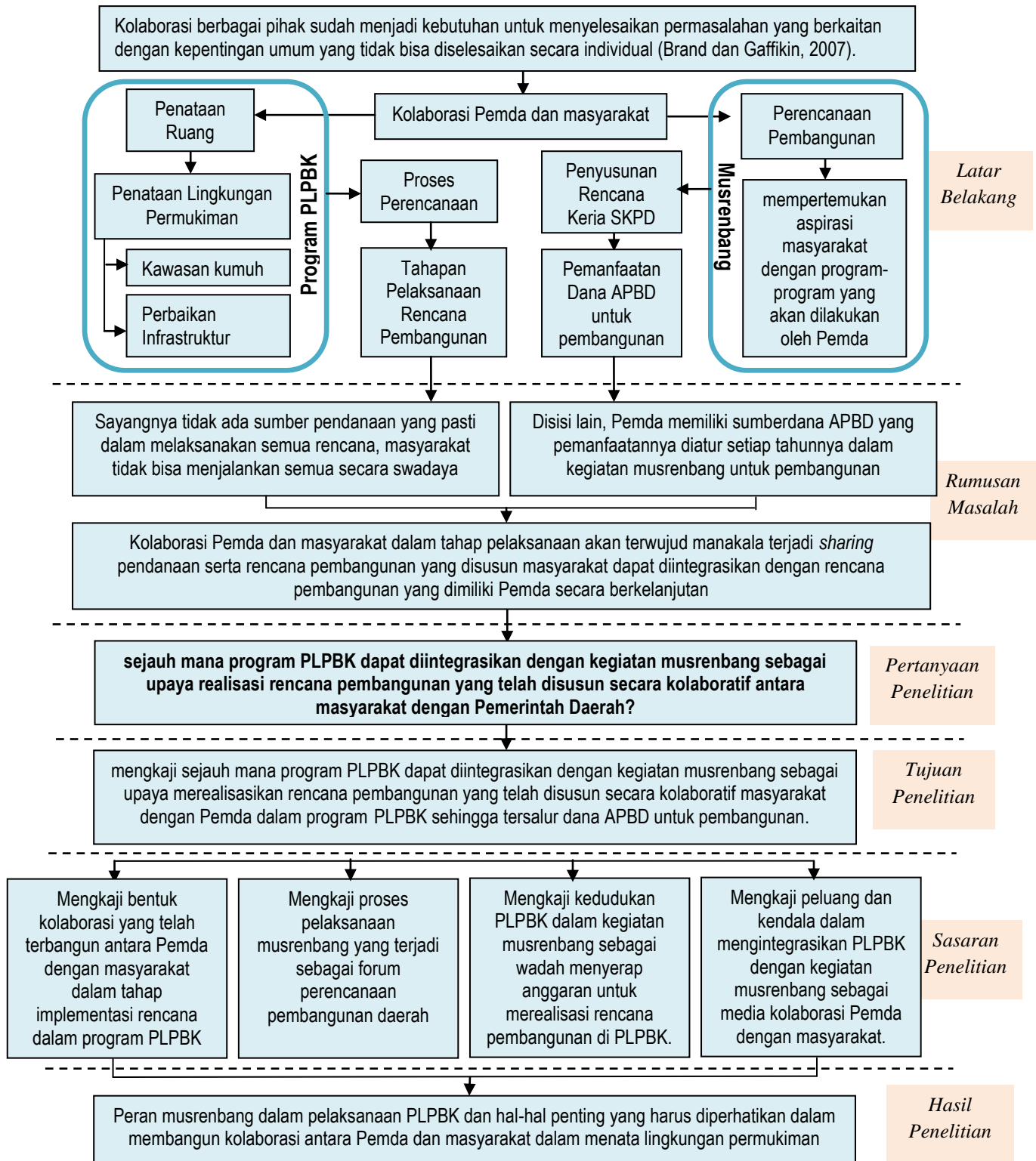
### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran secara ilmiah bagaimana proses perencanaan pembangunan akan lebih baik dilakukan tidak hanya menggunakan bentuk perencanaan partisipatif tetapi akan lebih maksimal apabila mengimplementasikan proses perencanaan kolaboratif. Kolaborasi akan manakala masyarakat dan Pemda memiliki sudut pandang yang sama dalam melihat kepentingan, prioritas, dan permasalahan yang dihadapi.
- b. Masyarakat, dapat dijadikan bahan masukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangatlah penting saat ini. Hal ini dikarenakan masyarakatlah yang benar-benar merasakan permasalahan pembangunan yang ada di lapangan dan masyarakat juga nantinya yang akan merasakan dampak perencanaan pembangunan yang dirumuskan baik dalam kegiatan musrenbang maupun kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.

### **1.7 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini menjadi urutan logis peneliti dalam menyusun arah penelitian yang dituangkan dalam sebuah bagan. Penelitian ini pada dasarnya mencoba untuk mengkaji sejauh mana program PLPBK dapat diintegrasikan dengan kegiatan musrenbang sebagai upaya merealisasikan rencana pembangunan yang telah disusun secara kolaboratif masyarakat dengan Pemda dalam program PLPBK. Untuk mengkaji hal tersebut maka dilakukan beberapa analisis utama yaitu mengkaji kolaborasi yang telah terbangun antara Pemda dengan masyarakat dalam tahap implementasi rencana dalam program PLPBK, mengkaji proses pelaksanaan musrenbang, mengkaji kedudukan PLPBK dalam musrenbang, dan mengkaji peluang serta kendala dalam mengintegrasikan program PLPBK dengan kegiatan musrenbang sebagai media kolaborasi Pemda dengan masyarakat. Secara detail kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini:



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

**GAMBAR 1.4**  
**KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN**

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini didasari oleh banyak karakteristik utama dari penelitian kualitatif cocok digunakan dalam penelitian ini. Bogdan dan Biklen (2008, dalam Emzir, 2012:2) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus kepada lima ciri utama yang mendasarinya yaitu bersifat naturalistik, data yang digunakan berupa data deskriptif, berkonsentrasi pada proses, cenderung menganalisis data secara induktif, dan berfokus pada perspektif partisipan.

Morse (1991, dalam Creswell, 2009) berpendapat bahwa jika sebuah tema/topik penelitian harus dipahami secara mendalam namun masih sedikit penelitian yang dilakukan tentang tema tersebut maka bisa menggunakan pendekatan kualitatif ini. Hal ini memungkinkan karena penelitian kualitatif ini pada dasarnya bertujuan untuk mengeksplorasi dan akan berguna ketika peneliti tidak mengetahui secara pasti variabel penting apa yang bisa digunakan untuk penelitian. Jenis pendekatan kualitatif diperlukan karena topik penelitian masih dianggap baru dimana belum diteliti dengan sampel tertentu.

Kondisi yang dijabarkan oleh Morse (1991) di atas pada dasarnya terjadi pada topik penelitian ini dimana masih sedikit penelitian yang dilakukan membahas secara mendalam kolaborasi Pemda dan masyarakat dalam konteks penataan ruang dan pembangunan khususnya di Indonesia. Tujuan dari penelitian kualitatif ini juga selaras dengan tujuan penelitian ini yaitu mencoba untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana kolaborasi yang tercipta antara Pemda dengan masyarakat dalam konteks penataan ruang dan perumusan arah pembangunan dalam menciptakan sebuah lingkungan permukiman yang lebih baik.

Secara lebih mendalam, Creswell (2009) menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang masuk ke dalam bentuk *Socially Constructed knowledge claims* dimana filosofinya individual (peneliti) mencoba mencari pemahaman mendalam secara naturalistik tentang situasi yang sedang dipelajari. Peneliti kualitatif cenderung menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga para informan yang menjadi sumber informasi dapat

mengekspresikan pandangan mereka. Peneliti kualitatif berusaha untuk memahami konteks dari para informan dimana membuat interpretasi dari apa yang mereka temukan. Atas dasar penjelasan ini, maka penelitian kualitatif cocok untuk mengkaji interaksi yang terjadi antara Pemda dengan masyarakat dalam menjalankan proses perencanaan kolaboratif secara nyata di lapangan.

### **1.8.2 Strategi Penelitian**

Creswell (2009) membagi strategi penelitian kualitatif ke dalam lima kategori utama yaitu fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, studi kasus, dan naratif. Dari kelima kategori tersebut, strategi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian studi kasus. Yin (2009:1) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus merupakan strategi penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian terkait dengan kebutuhan akademik, dimana salah satunya adalah penelitian bidang perencanaan wilayah dan kota seperti studi tentang ilmu perencanaan, lingkungan permukiman, ataupun terkait pelayanan publik.

Emzir (2012:20) juga menjelaskan bahwa model penelitian studi kasus ini berfokus kepada penemuan makna, proses, dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Creswell (2009) juga menjelaskan bahwa penelitian studi kasus merupakan bentuk penelitian kualitatif yang menggali sebuah proses (*explore the process*). Stake (1995, dalam Creswell, 2009:17) menjelaskan bahwa dalam penelitian studi kasus, peneliti mencoba menggali secara mendalam mengenai sebuah program, acara, aktivitas, proses, atau individual. Dalam model studi kasus ini penelitian dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dimana peneliti mengumpulkan data dengan berbagai prosedur dalam periode waktu yang berkelanjutan.

Pemilihan strategi studi kasus ini dijustifikasi oleh ciri utama yang dideskripsikan oleh Stake di atas di mana adanya suatu batasan baik berupa waktu tertentu, lokasi tertentu, dan hal yang diangkat berupa program, acara, aktivitas, atau proses suatu kejadian. Yin (2009:21) menjelaskan bahwa unit analisis dari penelitian studi kasus adalah "kasus" itu sendiri. Yin (2009) ini menekankan bahwa studi kasus lebih kepada sebuah metode penelitian yang meneliti fenomena

kontemporer yang ada di kehidupan nyata. Fenomena kontemporer ini sedang berlangsung atau telah berlangsung dan masih menyisakan dampak pada saat penelitian dilakukan. Dilatarbelakangi di atas maka penelitian ini cocok masuk ke dalam strategi studi kasus dengan unit analisis berupa program PLPBK dan proses pelaksanaan musrenbang.

Pada dasarnya penelitian kualitatif ini bersifat induktif dimana mencoba menghasilkan makna dari data yang dikumpulkan di lapangan (Creswell, 2009). Bagaimana sebuah teori digunakan dalam penelitian kualitatif akan mempengaruhi penempatannya. Teori bisa muncul diawal dan akan dimodifikasi atau disesuaikan berdasarkan pendapat partisipan di akhir penelitian sebagai makna dari data yang dikumpulkan di lapangan. Lather (1984, dalam Creswell, 2009) menjelaskan bahwa data dan teori memiliki hubungan timbal balik dimana kerangka kerja teori dapat menjadi wadah dimana data harus dituangkan. Penggunaan teori dalam studi kasus dapat bersifat untuk melengkapi, memperbaiki, atau menyempurnakan teori yang sudah ada berdasarkan temuan lapangan. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai teori perencanaan kolaboratif dan juga musrenbang agar dapat menggali informasi yang terarah kepada partisipan, menganalisis, dan mengintepretasikannya sesuai makna yang tergal di lapangan.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Rossmann dan Rallis (1998, dalam Creswell, 2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menggunakan metode yang bersifat interaktif. Metode pengumpulan data umumnya melibatkan partisipan secara aktif dalam penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang sering digunakan biasanya berupa wawancara, observasi, kajian dokumen, atau materi lainnya seperti email, suara, *scrapbook* dimana nantinya semua datanya dituangkan dalam bentuk kata dan gambar. Dalam rancangan awal penelitian ini, peneliti menentukan tiga metode utama yang digunakan yaitu wawancara mendalam, kajian dokumen, dan observasi lapangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan penelitian nantinya tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan metode lainnya seperti FGD untuk mendapatkan informasi lebih.



a. Wawancara Mendalam

Wawancara menurut Bungin (2007:108) diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan informan. Materi wawancara yang ditanyakan kepada informan akan berkaitan dengan masalah atau tujuan penelitian. Bungin (2007:108) juga menjelaskan bahwa wawancara mendalam (*in-depth interview*) sama seperti wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara berbeda dengan wawancara pada umumnya. Hal yang membedakan adalah wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian, dimana kondisi ini tidak pernah terjadi pada wawancara umumnya.

Wawancara akan menjadi metode pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semi terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka namun ada batasan alur dan tema pembicaraan. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memperoleh data secara mendalam dari informan mengenai persepsi, pengetahuan dan perasaan. Pertanyaan terbuka ini berupa pertanyaan yang bersifat primer dan netral. Herdiansyah (2011:128) menjelaskan bahwa primer diartikan bahwa pertanyaan bersifat umum untuk mengungkapkan data berdasarkan topik dan sifat netral yang memberikan kebebasan informan untuk menjawab tanpa ada tekanan.

b. Kajian Dokumen

Kajian dokumen ini merupakan metode pengumpulan data dimana melihat dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kajian dokumen ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan. Herdiansyah (2011:146) menjelaskan bahwa analisis ini memberi gambaran aktivitas, keterlibatan, jabatan, atau tanggungjawab subyek yang diteliti dimana itu semua tergantung dokumen yang dikaji. Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- Dokumen perencanaan PLPBK di masing-masing kelurahan.
  - Catatan-catatan hasil pertemuan kegiatan musrenbang di masing-masing kelurahan.
- c. Observasi Lapangan

Observasi lapangan ini merupakan tinjauan langsung ke lokasi kawasan prioritas PLPBK untuk melihat sejauh mana implementasi pembangunan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat di masing-masing kelurahan lokasi PLPBK. Hasil observasi ini berupa catatan dan dokumentasi lapangan.

#### 1.8.4 Kebutuhan Data

Penyusunan kebutuhan data ini disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah:

**TABEL I.2**  
**KEBUTUHAN DATA PENELITIAN**

Sasaran yang ingin dicapai	Aspek	Data yang dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
Mengkaji kolaborasi yang telah terbangun antara Pemda dengan masyarakat dalam tahap implementasi rencana dalam program PLPBK	Kontribusi Pemda dalam implementasi rencana PLPBK	Data kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan PLPBK	Kajian dokumen	BKM; ASKOT
Mengkaji proses pelaksanaan musrenbang sebagai forum perencanaan pembangunan daerah.	Proses identifikasi masalah dan penjangkaran usulan kegiatan di masyarakat	Deskripsi cara masyarakat mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungannya	Wawancara	BKM; KEL; TT
		Deskripsi mekanisme penyampaian usulan yang bersumber dari masyarakat	Wawancara	BKM; KEL; TT
		Deskripsi mekanisme pelaksanaan musrenbang	Wawancara	BKM; KEL; TT
	Pertemuan formal dan informal yang dilakukan sebagai forum dialog warga-Pemda	Deskripsi pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan dimana mempertemukan antar warga maupun warga-Pemda	Wawancara	BKM; KEL; TT
		Laporan dan dokumentasi kegiatan musrenbang	Kajian dokumen	KEL
Komitmen Pemda	Deskripsi instrumen (program	Wawancara;	BKM; KEL;	

Lanjutan:

Sasaran yang ingin dicapai	Aspek	Data yang dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
	dalam merealisasikan usulan masyarakat	beserta aturan hukum yang menguatkan) sebagai bentuk usaha dalam merealisasikan rencana masyarakat	kajian dokumen	TT
Mengkaji kedudukan PLPBK dalam kegiatan musrenbang sebagai wadah menyerap anggaran untuk merealisasi rencana pembangunan di PLPBK	Peranan produk rencana PLPBK sebagai bahan kajian dalam kegiatan musrenbang	Dokumen perencanaan PLPBK (RPLP dan RTPLP) di masing-masing lokasi penelitian	Kajian dokumen	BKM; ASKOT
		Deskripsi seberapa besar peranan Produk rencana PLPBK sebagai bahan kajian dalam kegiatan musrenbang	Wawancara	BKM; KEL; ASKOT
	Persepsi pelaku PLPBK tentang kedudukan program PLPBK dalam kegiatan musrenbang	Deskripsi mengenai seberapa besar kedudukan program PLPBK dalam kegiatan musrenbang	Wawancara	BKM; KEL; ASKOT
Mengkaji peluang dan kendala dalam mengintegrasikan program PLPBK dengan kegiatan musrenbang sebagai media kolaborasi Pemda dengan masyarakat.	Karakteristik rencana-rencana masyarakat yang dapat untuk diintegrasikan dengan rencana Pemda	Deskripsi mengenai karakteristik-karakteristik rencana masyarakat yang umumnya mudah untuk didanai atau disinkronkan dengan rencana Pemda	Wawancara	BKM; KEL; TT; ASKOT
	Persepsi pelaku PLPBK mengenai komitmen antara masyarakat dan Pemda dalam mewujudkan rencana PLPBK yang ada secara berkelanjutan	Deskripsi mengenai pandangan masyarakat dan Pemda terhadap kegiatan PLPBK dan upayanya dalam keberlanjutannya pelaksanaan	Wawancara	BKM; KEL; TT; ASKOT

Sumber: Analisis Penyusun, 2013

### 1.8.5 Penentuan Narasumber/Informan

Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan menjadi bagian terpenting karena berkaitan dengan informasi-informasi fokus penelitian yang dikaji. Menurut Bungin (2007:77) ada dua karakter penguasaan informasi peneliti tentang objek penelitian yaitu pertama, peneliti sebelumnya sudah memahami informasi tentang objek penelitian, dan yang kedua adalah peneliti benar-benar “buta” informasi mengenai objek penelitian. Kondisi yang ada pada penelitian ini

adalah peneliti sudah memahami sebagian informasi tentang objek penelitian, dengan demikian peneliti telah mengidentifikasi terlebih dahulu individu sebagai *key person* yang mampu memberikan informasi mengenai topik penelitian yang diangkat. *Key person* yang dipilih ini adalah informan yang terlibat dalam pelaksanaan PLPBK dan ikut berperan dalam memperjuangkan rencana PLPBK dalam wadah musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota/kabupaten baik di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini, *key person* yang dipilih untuk diwawancarai adalah:

**TABEL I.3**  
**KEY PERSON PENELITIAN**

No	Informan	Peran Responden dalam Penelitian	Inisial Informan
1	Kordinator/Asisten Kordinator Kota PLPBK	Melakukan monitoring pelaksanaan dan kualitas kegiatan PLPBK dalam skala kota/kabupaten dan berperan dalam kegiatan musrenbang.	Korkot/Askot
2	Anggota BKM	Pelaku PLPBK tahap perencanaan, pemasaran, dan pelaksanaan pembangunan dan mengikuti proses kegiatan musrenbang	BKM
3	Tim Teknis Pemda	Perwakilan SKPD yang terlibat dalam kegiatan PLPBK dan kegiatan musrenbang	TT
4	Perangkat Kelurahan	Pelaku yang mendorong partisipasi warga dalam kegiatan rembug-rembug warga/musyawah, yang terkait permasalahan dan potensi, merumuskan visi, kebutuhan dan rencana pembangunan.	KEL

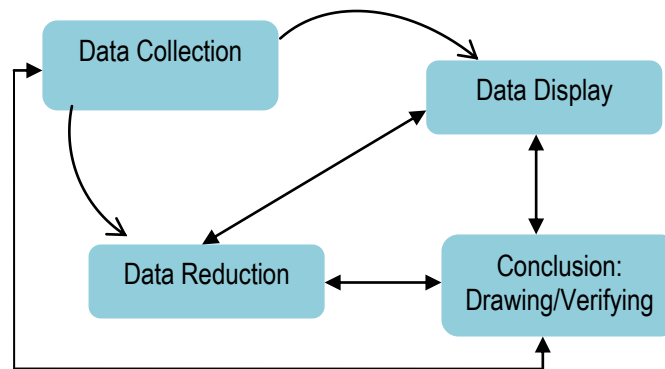
*Sumber: Analisis Penyusun, 2014*

Namun demikian, jika saat pengambilan data yang dilakukan beberapa informasi dirasa kurang lengkap, maka dilakukan strategi *snowball sampling* (strategi bola salju) dimana informan selanjutnya ditentukan oleh *key person* yang telah ditetapkan di atas. Informan yang dipilih dengan menggunakan strategi *snowball sampling* adalah Bappermas Kota Pekalongan dan perwakilan LPM Kota Pekalongan. Pemilihan *key person* tersebut didasari atas adanya *running hypotesis* (temuan lapangan) saat survei di lakukan.

### 1.8.6 Kompilasi dan Analisis Data

Walcott (1994, dalam Creswell, 2009) berpendapat bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya bersifat interpretatif dimana peneliti melakukan

interpretasi data. Hal ini termasuk mengembangkan deskripsi individu, menganalisis data untuk tema atau kategori, dan akhirnya membuat interpretasi atau menarik kesimpulan tentang maknanya secara pribadi dengan lebih teoritis serta mengajukan pertanyaan penelitian lebih lanjut jika dibutuhkan.



Sumber: Miles dan Huberman (1984:23)

**GAMBAR 1.5**  
**ALUR ANALISIS MODEL INTERAKTIF SEBAGAI SIKLUS YANG SALING**  
**BERHUBUNGAN**

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984, dalam Emzir, 2012:129) pada dasarnya membagi tahapan analisis data dalam empat bentuk utama dimana satu dengan yang lainnya saling berhubungan seperti pada gambar di atas dan penjelasan berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data seperti yang dijelaskan pada metode pengumpulan data di atas yang meliputi wawancara mendalam, kajian dokumen, dan observasi lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung selama peneliti masih merasa kurang menggali topik penelitian yang sedang diamati. Setelah data dirasa terkumpul secara cukup maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu reduksi data.

b. Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan bentuk pengolahan data mentah dimana data yang terkumpul direduksi melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pentransformasian, dan juga pemfokusan (Emzir, 2012:129). Inti dari reduksi data

ini adalah penggabungan segala bentuk data yang terkumpul (hasil wawancara, kajian dokumen, dan observasi lapangan) yang direduksi/diubah ke dalam bentuk tulisan yang siap untuk dianalisis. Wawancara yang dilakukan nantinya dituangkan dalam bentuk verbatim wawancara. Contoh dari verbatim wawancara seperti berikut ini:

**TABEL I.4**  
**CONTOH VERBATIM WAWANCARA**

<b>Baris</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
<i>Urutan baris dari pernyataan kolom uraian wawancara</i>	.....	<i>Tema yang terdapat pada pernyataan yang dikemukakan informan</i>
	.....	
	.....	

*Sumber: Herdiansyah (2011:168)*

Verbatim wawancara ini merupakan salah satu bentuk data mentah dimana digunakan kode warna untuk membedakan tema-tema yang muncul. Herdiansyah (2011:166) menjelaskan bahwa verbatim wawancara berisi tentang proses wawancara yang berlangsung beserta segala situasi yang terjadi. Semua hal yang dibicarakan diubah menjadi bentuk tulisan apa adanya tanpa ada kata yang dilewatkan, dikurangi, ataupun diedit. Satu verbatim wawancara ini akan mewakili satu pertemuan wawancara, dengan demikian verbatim yang dibuat nantinya adalah sebanyak wawancara yang dilakukan. Setelah verbatim tersusun, selanjutnya adalah akumulasi tema dari setiap informan. Akumulasi tema ini adalah sebagai ringkasan tema yang didapat dari setiap informan. Berikut ini contoh tabel akumulasi tema:

**TABEL I.5**  
**CONTOH TABEL AKUMULASI TEMA**

<b>No</b>	<b>Tema yang Muncul</b>	<b>Frekuensi</b>
	<i>Tema yang didapat dari verbatim wawancara tiap informan</i>	<i>Jumlah satuan tema yang muncul dari setiap wawancara</i>

*Sumber: Herdiansyah (2011:171)*

c. **Display Data**

Display data merupakan tahapan lanjutan dari tahap reduksi data dimana mengelola data setengah jadi yang telah memiliki alur tema yang jelas ke dalam

bentuk matriks agar lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis. Dalam display data ini metode analisis yang dilakukan adalah metode analisis tematik. Analisis ini memberikan penekanan atas jawaban dari informan beriklan terhadap pertanyaan yang diajukan sebagai ide implisit dan eksplisit yang nantinya terkategori ke dalam tema-tema. Cara identifikasi tema ini adalah dengan menyimpulkan makna dari pernyataan atau jawaban yang diberikan oleh informan. Jawaban ini nantinya dikategorikan menjadi tema-tema yang mendukung dalam analisis atau penarikan nantinya.

Ada dua matriks yang digunakan yaitu matriks sub kategorisasi tema dan matriks kategorisasi tema. Kategori ini merupakan suatu cara penyortiran data deskriptif yang telah dikumpulkan sehingga materi yang yang diberikan untuk tema tertentu dapat dipisahkan secara fisik dari data lain (Emzir, 2012:113). Matriks subkategorisasi tema merupakan kumpulan kutipan wawancara dari tiap-tiap informan yang memberikan informasi secara lebih mendetail dalam sebuah subtema dari tema yang umum. Miles dan Huberman (1984, dalam Herdiansyah 2011) menjelaskan bahwa bentuk matriks ini akan mempermudah peneliti dalam membaca dan melihat data secara lebih sistematis. Matriks subkategorisasi tema seperti adalah sebagai berikut:

**TABEL I.6**  
**CONTOH MATRIKS SUBKATEGORI TEMA**

<b>Tema :</b> <i>(diisi satu tema yang ada pada tabel akumulasi tema)</i>			
<b>Sub Tema</b>	<b>Informan</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Baris dalam Verbatim</b>
<i>pecahan dari tema yang bersifat lebih sederhana dan lebih mudah dicerna.</i>	Informan 1	<i>Kutipan Wawancara yang sesuai subkategorisasi tema</i>	
	Informan 2	<i>Kutipan Wawancara yang sesuai subkategorisasi tema</i>	
	Informan 3	<i>Kutipan Wawancara yang sesuai subkategorisasi tema</i>	
	.....	.....	
	.....	.....	
	Informan Terakhir	<i>Kutipan Wawancara yang sesuai subkategorisasi tema</i>	

*Sumber: Herdiansyah (2011:171) yang diolah oleh penyusun, 2014*

Setelah matriks subkategori tema tersusun dari semua tema yang ada, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks kategorisasi tema sebagai kesimpulan keseluruhan tema-tema dan subtema yang ditemukan dari seluruh proses wawancara yang dilakukan. Berikut ini contoh format matriks kategorisasi tema:

**TABEL I.7**  
**CONTOH MATRIKS KATEGORI TEMA**

Tema	Sub Tema	Tema	
		Deskripsi Singkat	Kode
<i>Tema yang telah tersusun dalam tabel akumulasi tema</i>	<i>pecahan dari tema yang bersifat lebih sederhana dan lebih mudah dicerna.</i>	..... ..... .....	<i>A-B/CD</i>

Sumber: Herdiansyah (2011:176)

Herdiansyah (2011:177) menjelaskan bahwa dalam tahapan display data ini, teknik *coding* atau proses pengkodean merupakan bagian penting. Inti dari pengkodean ini mencantumkan pernyataan-pernyataan informan sesuai dengan kategori tema dan subkategori tema dengan memberikan kode-kode tertentu pada setiap pernyataan dari informan tersebut. Kode yang diberikan ini berfungsi sebagai identitas dan keterangan dari kutipan wawancara pada verbatim wawancara sebelumnya. Penulisan kode adalah sebagai berikut:

<b>A-B/C/D</b>	
A	: inisial informan (contoh kode "BKM" menunjukkan anggota BKM)
B	: Urutan Wawancara (contoh kode "W01" menunjukkan wawancara ke-1)
C	: Inisial Wilayah (P = Pekalongan, K = Kendal)
D	: baris awal pernyataan dalam verbatim wawancara

Sumber: Analisis Penyusun, 2014

**GAMBAR 1.6**  
**PENULISAN PENGKODEAN**

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diangkat. Herdiansyah (2011:179) menjelaskan ada tiga tahapan yang dilakukan dalam tahap kesimpulan ini yaitu:

- Menguraikan subkategori tema dalam tabel kategorisasi dan pengodean disertai dengan kutipan verbatim wawancara.
- Menjelaskan hasil temuan penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian terkait fokus penelitian.



- Membuat kesimpulan dari hasil temuan dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan.

### **1.8.7 Keabsahan Data (Triangulasi)**

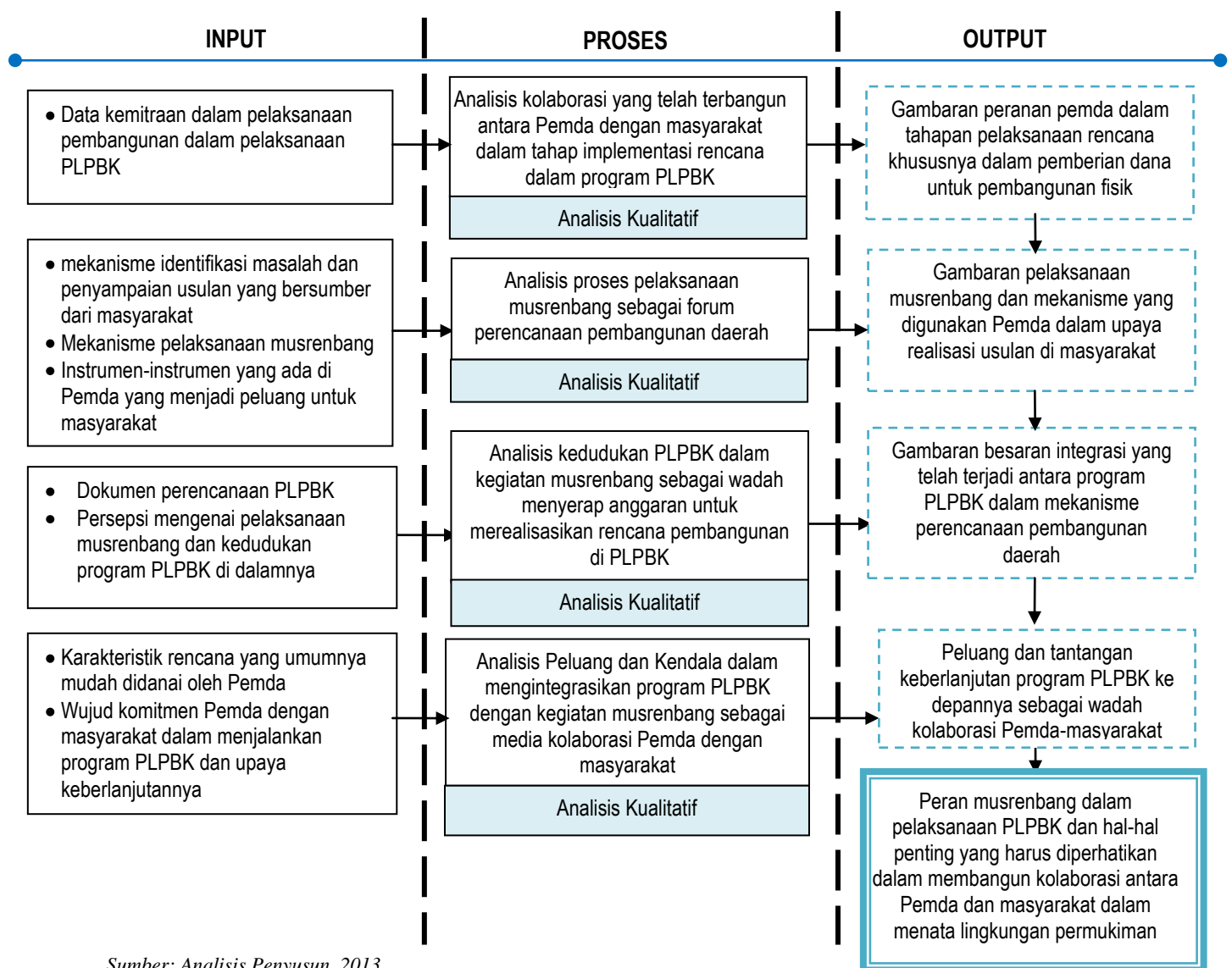
Yin (2009:114) menjelaskan bahwa salah satu prinsip pengumpulan data adalah menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai bentuk triangulasi. Triangulasi menurut Herdiansyah (2011:201) adalah penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Triangulasi ini dilakukan sebagai bentuk cara untuk menguji keabsahan data yang digunakan agar hasil temuan penelitian bersifat autentik, dapat dipertanggungjawabkan, dan data yang diperoleh mewakili kondisi sebenarnya dari sudut pandang informan. Patton (2002, dalam Yin, 2009:116) menjelaskan ada empat tipe triangulasi yaitu triangulasi dalam hal teori, triangulasi dalam hal metode dan strategi penelitian, triangulasi dalam hal metode pengumpulan data, dan triangulasi dalam hal *observer/investigator*.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis triangulasi dalam hal metode pengumpulan data sehingga data didapat tidak hanya berasal dari satu sumber. Ada dua cara yang dilakukan, yaitu melakukan cek ulang data (verifikasi). Verifikasi dilakukan dengan mengecek ulang apakah data dan informasi yang disampaikan informan dalam wawancara nantinya sesuai dengan situasi nyata yang ditemukan di lapangan atau bukti lainnya. Untuk itu maka teknik pengumpulan data yang dilakukan tidak hanya berupa satu metode saja, melainkan dengan menggunakan beberapa metode. Sebagai contoh informasi yang dikemukakan informan melalui wawancara akan ditelusuri lagi keabsahannya dengan bukti-bukti nyata lainnya seperti dokumen-dokumen pendukung yang nantinya akan dianalisis. Cara seperti ini bisa dipakai untuk menguji kevalidan data yang digunakan.

### **1.8.8 Jenis Analisis**

Dalam penelitian terkait kolaborasi Pemda dengan masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman, ada empat analisis utama yang dilakukan. Keempat analisis tersebut adalah:

- a. Analisis bentuk kolaborasi yang telah terbangun antara Pemda dengan masyarakat dalam tahap implementasi rencana dalam program PLPBK.
- b. Analisis proses pelaksanaan musrenbang sebagai forum perencanaan pembangunan daerah.
- c. Analisis kedudukan PLPBK dalam kegiatan musrenbang sebagai wadah menyerap anggaran untuk merealisasi rencana pembangunan di PLPBK.
- d. Analisis peluang dan kendala dalam mengintegrasikan program PLPBK dengan kegiatan musrenbang sebagai media kolaborasi Pemda dengan masyarakat.



Sumber: Analisis Penyusun, 2013

**GAMBAR 1.7**  
**KERANGKA ANALISIS PENELITIAN**

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dibagi ke dalam lima bagian yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Secara umum berisi penjelasan justifikasi mengapa penelitian dilakukan dan objek penelitian yang diangkat. Bab ini terdiri atas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, keaslian penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penyusunan laporan penelitian ini.

### **Bab II Kajian Literatur Perencanaan Kolaboratif sebagai Dasar Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat**

Berisi tentang pembahasan mengenai literatur-literatur yang mampu memberi gambaran mengenai tema penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai proses perencanaan kolaboratif, konsep dasar penataan lingkungan permukiman, dan konsep dasar musyawarah perencanaan pembangunan

### **Bab III Gambaran Pelaksanaan Program PLPBK Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal**

Bab ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program PLPBK yang dijalankan di tiga kelurahan di Kota Pekalongan dan tiga kelurahan di Kabupaten Kendal. Gambaran ini terdiri atas masalah yang diangkat, proses perencanaan yang dilakukan, dan keluaran yang dihasilkan dari program PLPBK.

### **Bab IV Analisis Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Program PLPBK**

Bab ini menjelaskan tentang hasil temuan lapangan yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan kolaborasi yang terjadi antara Pemda dengan masyarakat dalam pelaksanaan rencana Program PLPBK dan peranan musrenbang merealisasikan rencana PLPBK di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal.

### **Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bab ini menjelaskan mengenai temuan penelitian yang fokus dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dan rekomendasi ke depannya yang difokuskan kepada berbagai pelaku yang terlibat dalam program PLPBK.